



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

IMPLEMENTASI ELEKTRONIK KINERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Meydita Pratama Syahfitri

Fakultas Ilmu Sosial ,Universitas Islam Kuantan Singingi
Jalan Gatot Sibroto KM 7 Kebun Nenas Jake Teluk Kuantan
Email:meyditapratamasyahfitrii@gmail.com

ABSTRACT

The research was carried out at the office of the education and training authorities of the district of Kuantan Singingi. The aim of this research is to find out whether the application of E-Performance has been properly implemented or has not been used in the education and training agencies of the District of Kabupaten Kuantan Singingi, as the central authority that manages the application. The analysis used in this research was a qualitative method that the data collected was analyzed by describing and linking theories according to existing problems, then interpreted on the relevant result and conclusion drawn and given advice. While the population in this study were all employees of the Regional Revenue Service plus several taxpayers with the sampling technique used random sampling. While the data collection technique in this study were observation, interview and documentation. Based on the result of research on the implementation of Personnel Agency, it has not been implemented well.

Keywords: Implementation, E-Performance.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sudah diterapkan dengan baik atau belum penggunaan aplikasi E-Kinerja pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai instansi yang berpusat mengelola aplikasi tersebut. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode kualitatif, yaitu data yang terkumpul dianalisis dengan menguraikan serta mengaitkan teori-teori sesuai dengan permasalahan yang ada, kemudian diinterpretasikan terhadap hasil yang relevan dan diambil kesimpulan serta diberikan saran. Sedangkan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi Elektronik Kinerja pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi belum terimplementasi dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi, E-Kinerja.



1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Digitalisasi sangat berguna pada penyelenggaraan urusan pemerintahan, tidak hanya pemerintah pusat namun penggunaan digitalisasi juga bisa diterapkan di pemerintah daerah. Pada dasarnya pemerintah daerah bertugas untuk menyelenggarakan tata kelola yang ada dikawasan daerah, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah yang bertujuan untuk mengelola urusan daerah. Sedangkan pemerintah pusat mengurus dan mengelola urusan negara termasuk mengelola daerah sekalipun. Meskipun pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah, bukan berarti pemerintah pusat lepas tangan begitu saja akan pengelolaan daerah. Akana tetapi pemerintah pusat tetap mengawasi kinerja pemerintah daerah. Peranan digitalisasi terhadap tata kelola pemerintah tidak hanya berperan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan saja, tetapi juga bisa meningkatkan kedisiplinan. Sebeb kedisiplinan mempengaruhi kualitas kinerja suatu organisasi. Tentunya hal ini berpengaruh juga terdadaap pemerintah daerah. Maka dari itu pemerintah berupaya mengelola tata pemerintahan agar menjadi lebih baik lagi kedepannya. Upaya tersebut dapat dilakukan seperti membuat kebijakan berupa program E-Kinerja. Hal ini bertujuan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi bagi urusan pemerintahan baik pusat maupun daerah. Begitu juga dengan pemerintah daerah Kabupaten Kuantan Singingi. Masing-masing pemerintah daerah mempunyai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang berfungsi untuk membantu penyelenggaraan dan mengelola urusan pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Dearah (DPRD) Kuantan Singingi Riau menyoroti kinerja dan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan pemerintahan Kabupaten Kuantan Singingi. Hal itu menjadi salah satu masukan dari DPRD Kuansing terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (KLPj) Bupati Kuansing 2020. DPRD Kuansing menilai, tingkat kinerja dan disiplin ASN sangat rendah. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Kuansing melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) agar melakukan pembinaan dan membuat terobosan berupa program kegiatan penunjang yang dapat meningkatkan kinerja dan disiplin. ASN yang tidak disiplin jelas melanggar PP Nomor 53 Tahun 2010 Tentang disiplin PNS. Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing menyatakan bahwa akan melakukan evaluasi terhadap kinerja ASN di Kuansing. Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi telah membuat sebuah terobosan untuk peningkatan kinerja dan disipilin ASN, yakni sebuah aplikasi bernama E-Kinerja. Aplikasi ini pertama kali diterapkan pada tahun 2021. Aplikasi E-Kinerja adalah aplikasi berbasis web yang digunakan oleh pemerintah untuk menganalisis kebutuhan jabatan, beban kerja jabatan dan beban kerja unit/satuan kerja organisasi. E-Kinerja sendiri merupakan salah satu bentuk kebijakan inovasi E-Governance (Tata Kelola Pemerintahan) sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2017 berupa penerapan aplikasi E-Kinerja berdasarkan sasaran kerja pegawai. Tujuan E-Kinerja adalah tersedianya data kinerja pegawai ASN dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pada dasarnya E-Kinerja sangat berperan penting dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Sehingga berdasarkan uraian diatas penulis mengangkat judul



“Implementasi Elektronik Kinerja Pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **“Bagaimana penerapan E-Kinerja yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi”.**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi E-Kinerja yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Penelitian ini diharapkan menambah wawasan pengetahuan yang lebih luas tentang studi kajian administrasi negara.
- 1.4.2 Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti, menambah pengetahuan dan informasi tentang penerapan Implementasi E-Kinerja pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi.
- 1.4.3 Penelitian ini dapat dijadikan input bagi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi dalam meningkatkan prestasi kerja Aparatur Sipil Negara sehingga dapat berdayaguna dalam penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 1.4.4 Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi untuk pemerintah daerah.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori/Konsep Ilmu Administrasi Negara

Menurut Agus Hiplunudin (2021:22) administrasi negara terdiri atas semua kegiatan negara untuk menunaikan dan melaksanakan kebijaksanaan negara (*public administration consist... all those operations having for the fulfilment and enforcement of public policy*) lebih lanjut, Atmosudirdjo melihat administrasi negara pada fungsinya lebih luas lagi, yaitu melaksanakan dan menyelenggarakan kehendak-kehendak (*strategy policy*) serta keputusan-keputusan pemerintah secara nyata (implementasi dan menyelenggarakan undang-undang menurut pasal-pasal nya sesuai dengan peraturan pelaksanaan yang ditetapkan). Untuk memperjelas makna administrasi negara tersebut, Atmosudirdjo memerincikannya dalam beberapa pengertian administrasi negara yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah sebagai berikut: Pertama, sebagai aparatur negara, aparatur pemerintahan, atau sebagai institusi politik (kenegaraan). Kedua, administrasi negara sebagai fungsi atau sebagai aktivitas melayani pemerintah, yaitu sebagai kegiatan pemerintah operasional. Ketiga, administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan undang-undang. Dari pengertian tersebut sesungguhnya pemaparan mengenai administrasi negara dapat dilihat dalam dua segi, yaitu: Pertama, administrasi negara sebagai organisasi dan kedua, administrasi yang secara khas mengejar tercapainya tujuan yang bersifat kenegaraan atau publik yang artinya tujuan-tujuan yang ditetapkan undang-undang secara *dwigent recht* (hukum yang memaksa). (Agus Hiplunudin, 2021:22).

2.1.2 Teori/Konsep Kebijakan



Menurut Engkus, 2022:18 kebijakan publik adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategi atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik, kebijakan publik harus dibuat oleh otoritas politik, yaitu mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak. Selanjutnya, kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik di negara modern adalah pelayanan publik, yaitu segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak. Menurut Nugroho dalam buku Kebijakan Publik (Uddin, 2017:10) Kebijakan publik dalam praktek kenegaraan dan pemerintahan pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip, yaitu: Pertama, dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik (formulasi kebijakan); kedua, bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan; dan ketiga; bagaimana kebijakan publik tersebut di evaluasi. akan tetapi, dari semua isu diatas tersebut menurut Said Zainal Abidin dalam buku Kebijakan Publik (Uddin, 2017:10), tidak semua mempunyai prioritas yang sama untuk diproses. Ini ditentukan oleh suatu proses penyaringan melalui serangkaian kriteria.

2.1.3 Teori/Konsep Implementasi

Menurut Mulyadi (2020:12) implemtasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan. Sedangkan menurut Wahyu (Mulyadi, 2015:50) studi implementasi merupakan studi untuk mengetahui proses implementasi, tujuan utama proses implementasi itu sendiri untuk memberi umpan balik pada pelaksanaan telah sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan, selanjutnya untuk mengetahui hambatan dan problem yang muncul dalam proses implementasi.

2.1.4 Teori/Konsep Pemerintahan Daerah

Pengertian tentang Pemerintahan Daerah menurut pasal 1 ayat 2 UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luanya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah berhak menempatkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Susunan dan taa cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

2.1.5 Teori/Konsep Teknologi Informasi

Menurut Al-Khowarizmi (2021:1-2) Teknologi Informasi (TI) merupakan salah satu ilmu atau studi tentang melakukan proses perancangan, penerapan implementasi, perbaikan dalam pengembangan, mendukung atau manajemen

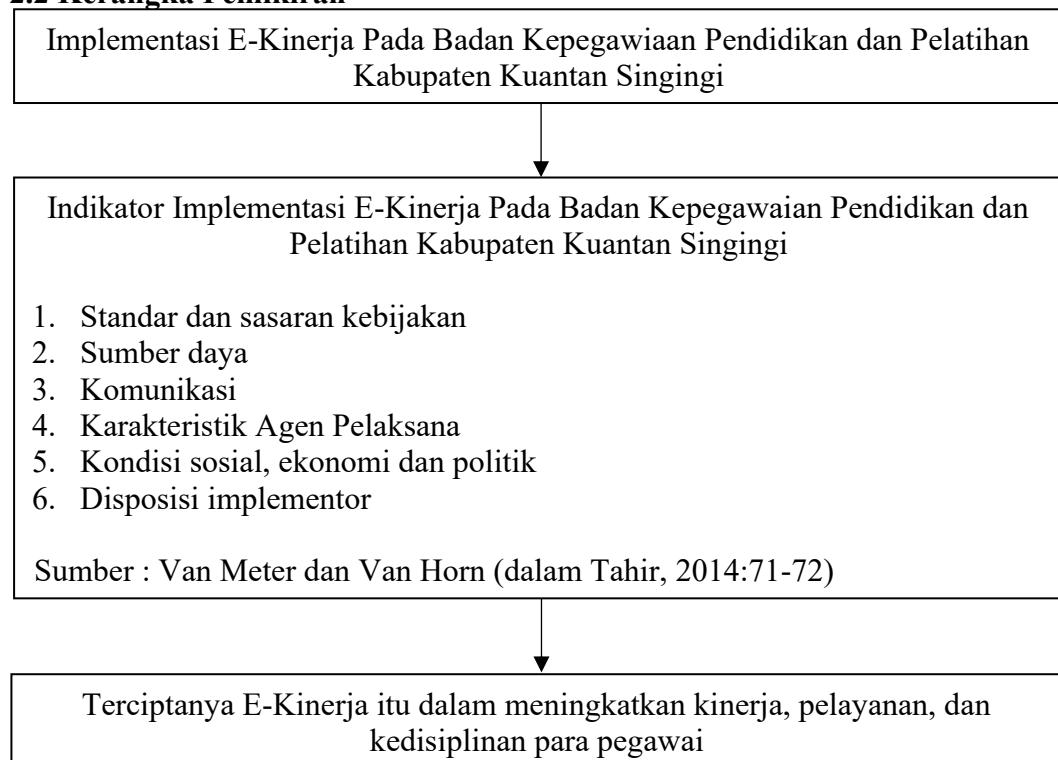


informasi berbasis komputer, yang di khususkan pada perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*). TI memanfaatkan komputer sebagai media elektronik dan perangkat lunak yang terbentuk dari sistem atau aplikasi untuk mengubah, menyimpan, mengelolah, melindungi, mentransmisikan dan memperoleh informasi secara *safety*.

2.1.6 Teori/Konsep E-Kinerja

Menurut Mukti (2019:2) E-Kinerja adalah aplikasi buatan yang dikhususkan untuk memantau dan menilai kinerja dari pegawai secara langsung dengan cara memasukkan data kerja harian kedalam software untuk mendapatkan persetujuan dari atasan. Disamping itu menurut Putri (2014:5) E-Kinerja merupakan suatu aplikasi yang berbasis web yang dipergunakan untuk menganalisis jabatan, beban kerja, unit maupun satuan kerja organisasi yang merupakan dasar untuk menghitung prestasi kerja dan pemberian intensif kerja. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2019:3) menunjukkan bahwa penerapan E-Kinerja memiliki pengaruh positif serta signifikan terhadap kinerja.

2.2 Kerangka Pemikiran



2.3 Defenisi Operasional

Untuk memudahkan dalam menganalisa penelitian ini, berikut ini dijelaskan konsep yang digunakan sebagai acuan penelitian ini sebagaimana yang dijelaskan dalam teori Van Meter dan Van Horn (dalam Tahir, 2014:71-72):

1. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat di realisasi. Apabila standar sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.



2. Sumber daya merupakan dukungan yang penting bagi kebijakan. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik dari sumber daya manusia (human resources) maupun sumber daya non manusia (non-human resources).
3. Komunikasi merupakan proses pertukaran informasi, ide, gagasan, perasaan dan pendapat antara dua orang atau lebih. Dalam implementasi kebijakan perlu adanya dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
4. Karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.
5. Kondisi ekonomi, sosial dan politik mencakup sumber daya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan.
6. Disposisi implementor mencakup tiga hal yang penting yakni respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yakni pemahamannya terhadap kebijakan dan intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

2.4 Konsep Operasional

Judul	No	Indikator	Sub Indikator
Implementasi Elektronik Kinerja Pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi	1	Standar dan Sasaran Kebijakan	a. Tujuan E-Kinerja b. Terukur/jelas c. Dampak E-Kinerja
	2	Sumber Daya	a. Sumber daya manusia b. Sumber daya anggaran c. Sumber daya teknologi
	3	Komunikasi	a. Keberhasilan b. Koordinator antar pihak c. Keterbukaan informasi
	4	Karakteristik Agen Pelaksana	a. Dukungan b. Sikap c. Kompetensi
	5	Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik	a. Pegawai b. Keuangan c. Sanksi E-Kinerja
	6	Disposisi Implementor	a. Respon b. Kognisi/Pemahaman c. Internalisasi



3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian survei dan menggunakan tingkat eksplanasi deskriptif dan analisa data kualitatif. Kaitan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tipe penelitian eksplanasi deskriptif dan analisa data kualitatif untuk menjelaskan dan menggambarkan mengenai Implementasi E-Kinerja Pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi.

3.2 Informan

Informan penelitian adalah seseorang yang memiliki informasi mengenai objek suatu penelitian tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Dalam hal ini yang menjadi informan adalah pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi yang berjumlah 4 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

NO	Unsur Informan	Key Informan	Presentase%
1	Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	1	25%
2	Kabid Diklat	1	25%
3	Kabid Pembinaan Aparatur	1	25%
4	Kabid Administrasi	1	25%
Total		4	100%

Sumber: Modifikasi Penelitian 2024

3.3 Sumber Data

3.3.1 Data Primer

Data Primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Peneliti ini juga survei dan wawancara dengan beberapa narasumber sesuai dengan keperluan penelitian

3.3.2 Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang didapat dari catatan, buku, majalah, jurnal, artiker, buku-buku teori, dan sebagainya. Data yang diperoleh dari data sekunder ini tidak perlu diolah lagi. Sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpulan data.

3.4. Fokus Penelitian

Tidak ada penelitian yang dapat dilakukan tanpa adanya fokus. Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi E-Kinerja pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan di Kabupaten Kuantan Singingi.



3.5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana suatu penelitian itu dilakukan. Adapun lokasi yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Komplek Perkantoran di Kabupaten Kuantan Singingi.

3.6. Metode Pengumpulan Data

3.6.1 Pengamatan (observasi)

Menurut Gunawan (2015:143) istilah observasi berasal dari bahasa latin yang berarti “melihat” dan “memperlihatkan”. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena tersebut.

3.6.2 Wawancara

Wawancara (*interview*) menurut Esterberg dalam Sugiyono (2019:239) adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

3.6.3 Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2014:240) dokumentasi merupakan catatan mengenai suatu peristiwa yang sudah berlaku. Peneliti mengumpulkan dokumentasi yang dapat berupa tulisan, gambar, atau karya-karya menumental seseorang.

3.7. Metode Analisis Data

Menurut Sugiyono (2020:131) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat Kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

3.7.1 Pengumpulan Data

Yaitu pengumpulan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi yang dipandang tepat untuk menentukan fokus serta pendalamannya data pada proses pengumpulan data berikutnya.

3.7.2 Reduksi Data (*reduction data*).

Yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, informasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.

3.7.2 Penyajian Data (*Data Display*).

Yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh dari berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.

3.7.3 Penarikan Kesimpulan (*conclusion drawing/verification*).

Yaitu dalam pengumpulan data dan tanggap terhadap suatu yang diteliti langsung di lapangan dengan penyusunan pola-pola pengarah dan sebab akibat.



Hasil Penelitian dan Pembahasan Tentang Implementasi Elektronik Kinerja Pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi

Untuk melihat hasil penelitian lebih sempurna dan maksimal terhadap Implementasi Elektronik Kinerja Pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi, peneliti dengan sengaja turun ke lapangan untuk melakukan wawancara atau tanya jawab langsung dengan informan yang telah ditentukan, serta dengan memberikan beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

Indikator Standar dan Sasaran Kebijakan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat dilihat bahwa dalam indikator standar dan sasaran kebijakan belum terlaksana dengan baik. Karena masih ada sebagian pegawai yang tidak konsisten dalam menggunakan aplikasi E-Kinerja, dan pegawai juga bisa memanipulasi terkait kehadiran dalam mengisi absensi.

Indikator Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat dilihat bahwa dalam indikator sumber daya belum bisa dikatakan baik. Hal ini didasarkan pada kurang disiplinnya pegawain dalam mengisi kehadiran. Untuk sumber daya anggaran juga masih terbatas, hal ini jelas akan berpengaruh terhadap kualitas program E-Kinerja. Begitu juga dengan sumber daya teknologi, yang mana masih sering ditemui masalah dan banyak kendala yang terjadi pada server E-Kinerja.

Indikator Komunikasi

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat dilihat bahwa dalam indikator komunikasi sudah berjalan dengan baik. BKPP sudah berhasil dalam memberi pemahaman terkait penggunaan E-Kinerja, juga hubungan antar pihak implementor terjalin dengan baik dalam artian implementor saling membantu dan bekerjasama. Untuk penyampaian informasi sudah dikatakan baik, penyampaian informasi dilakukan secara langsung oleh perwakilan BKPP yakni dari Kepala Sub Bagian Umum.

Indikator Karakteristik Agen Pelaksana

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat dilihat bahwa dalam indikator karakteristik agen pelaksana sudah baik. Seluruh pegawai sudah paham cara menggunakan aplikasi E-Kinerja dan seluruhnya mendukung program ini, juga memiliki sikap tanggung jawab dalam penerapan program E-Kinerja.

Indikator Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat dilihat bahwa dalam indikator lingkungan ekonomi, sosial, dan politik kurang baik. Terutama pada kondisi ekonomi yang mana anggaran untuk mendukung program E-Kinerja kurang baik. hal ini tentu akan berpengaruh terhadap kualitas E-Kinerja. Sedangkan pada kondisi politik yang mana pemerintah kurang tegas dalam memberikan sanksi E-Kinerja kepada ASN yang kurang disiplin. Untuk kondisi sosial atau antar pegawai BKPP semuanya sudah menjalankan E-Kinerja.

Indikator Disposisi Implementor

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat dilihat bahwa dalam indikator disposisi implementor sudah baik. Seluruh pegawai sudah mampu dalam



menggunakan E-Kinerja. Perlu dilakukan pemahaman lebih dalam terkait penggunaan E-Kinerja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Implementasi Elektronik Kinerja Pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi dapat disimpulkan bahwa penerapan E-Kinerja pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi belum terlaksana dengan baik.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Elektronik Kinerja Pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi maka adapun saran-saran yang diberikan sebagai berikut:

- 6.2.1 Sebaiknya pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi mengkaji ulang Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2023 Tentang
- 6.2.2 Memberikan reward kepada pegawai yang selalu mengisi absen secara tepat waktu, sehingga para pegawai termotivasi untuk menjadi pegawai yang patuh terhadap kewajibannya.
- 6.2.3 Meningkatkan kualitas server agar proses absensi dapat berjalan dengan baik
- 6.2.4 Pegawai sebaiknya meningkatkan tanggung jawab terhadap kewajiban yang sudah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Al-Khowarizmi. 2021. *Pengantar Teknologi Informasi (Dalam Perkembangan Data Science)*. Medan: Umsu Press.
- Hiplunudin Agus. 2021. *Etika Administrasi Negara*. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Engkus. 2022. *Kebijakan Publik (Konsep, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi serta Perubahan)*. Bekasi: PT. Kimshafi Alung Cipta.
- Uddin, Sobirin. 2017. *Kebijakan Publik*. Makassar: CV. Sah Media
- Mulyadi, D. 2015. *Studi Kebijakan dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Gunawan, Imam. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

B. Jurnal

Mukti, Dwi Rafita, Sri Wahyu Lelly Hana Setyanti, dan Lilik Farida. (2019). “Penerapan Sistem Penilaian Kinerja Berbasis E-Kinerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Melalui Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi”. *EJournal Ekonomi Bisnis dan Akutansi* 6(2):175.

Nurhayati, Ema. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Penilaian E-Kinerja dan Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai di Kecamatan Semarang Timur Melalui Motivasi Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Bisnis* 2(2):79-91.

Putri, Komara Eka, Muhammad Arfan, dan Hasan Basri. (2014). Pengaruh Penerapan E-Kinerja dan Pengaruh (Reward) Terhadap Kinerja Aparatur Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Pemerintahan Kota Banda Aceh. *Jurnal Magister Akutansi*. Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 3(4):1-10.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah